

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan misi RPJMD selaras dengan arahan RPJPD sebagai pembangunan daerah tahap kedua dan ketiga, yaitu tahap Pelengkapan Instrumen Inovatif dan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlangsung.

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera

“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Arti Visi:

- | | |
|-----------|--|
| Mandiri | : Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing. |
| Unggul | : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul |
| Berbudaya | : Masyarakat memiliki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang mulia atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Religius | : Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Sejahtera | : Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata. |

5.2. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.**
- 2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.**
- 3. Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.**
- 4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.**
- 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.**

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Tegal diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai kerangka agar pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan kesisteman yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Kerangka pembangunan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Kerangka pembangunan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks.

Sistem Inovasi Daerah adalah sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

1. Kerangka umum bagi inovasi, yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.

Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya sistem inovasi di daerah.

2. Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan absorpsi dunia usaha, yaitu mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.

Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara sementara atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara melekat dan menjalankan fungsi koordinasi. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan yang mewadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.

3. Kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbang.

Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

Penelitian dan pengembangan yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya penelitian dan pengembangan tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada dan atau dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorbsiserta difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.

4. Budaya inovasi, yaitu membangun budaya inovasi

Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.

5. Sistem inovasi dan klaster industri, yaitu menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah

Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.

6. Perkembangan dunia, yaitu penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global

Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah.

7. Afirmasi wilayah, yaitu pengembangan wilayah tertinggal

Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generik sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.

8. Afirmasi pengungkit, yaitu penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain *telecenter* dan pemerintahan berbasis elektronik.

Delapan agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD merupakan kerangka kebijakan. Dalam struktur (hierarkhi) perencanaan strategis (*strategic planning*), yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arrah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam kerangka pembangunan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya, Sistem Inovasi Daerah melingkupi RPJMD ini secara keseluruhan sebagai pendekatan siklus pembangunan. Sebagai kerangka pembangunan yang melingkupi RPJMD, telah diidentifikasi 9 (sembilan) kerangka pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka pembangunan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan kebijakan unggulan pemerintah daerah yaitu Cinta Desa, Cinta

Rakyat, Cinta Produk Tegal dan Cinta Budaya Tegal. Kerangka pembangunan tersebut adalah:

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Desa

1. Kebijakan Cinta Desa

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat

1. Reformasi Birokrasi (Cinta Rakyat)
2. Permukiman Kreatif (Cinta Rakyat)

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Produk Tegal

1. Industri Permesinan (Cinta Produk Tegal)
2. Industri Pertanian (Cinta Produk Tegal)

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal

1. Ekonomi Berbasis Seni Budaya (Cinta Budaya)
2. Budaya Rukun dan Toleran (Cinta Budaya)
3. Wisata Purbakala (Cinta Budaya)
4. Pengobatan Alami (Cinta Budaya)

Masing-masing kebijakan unggulan yang dijabarkan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

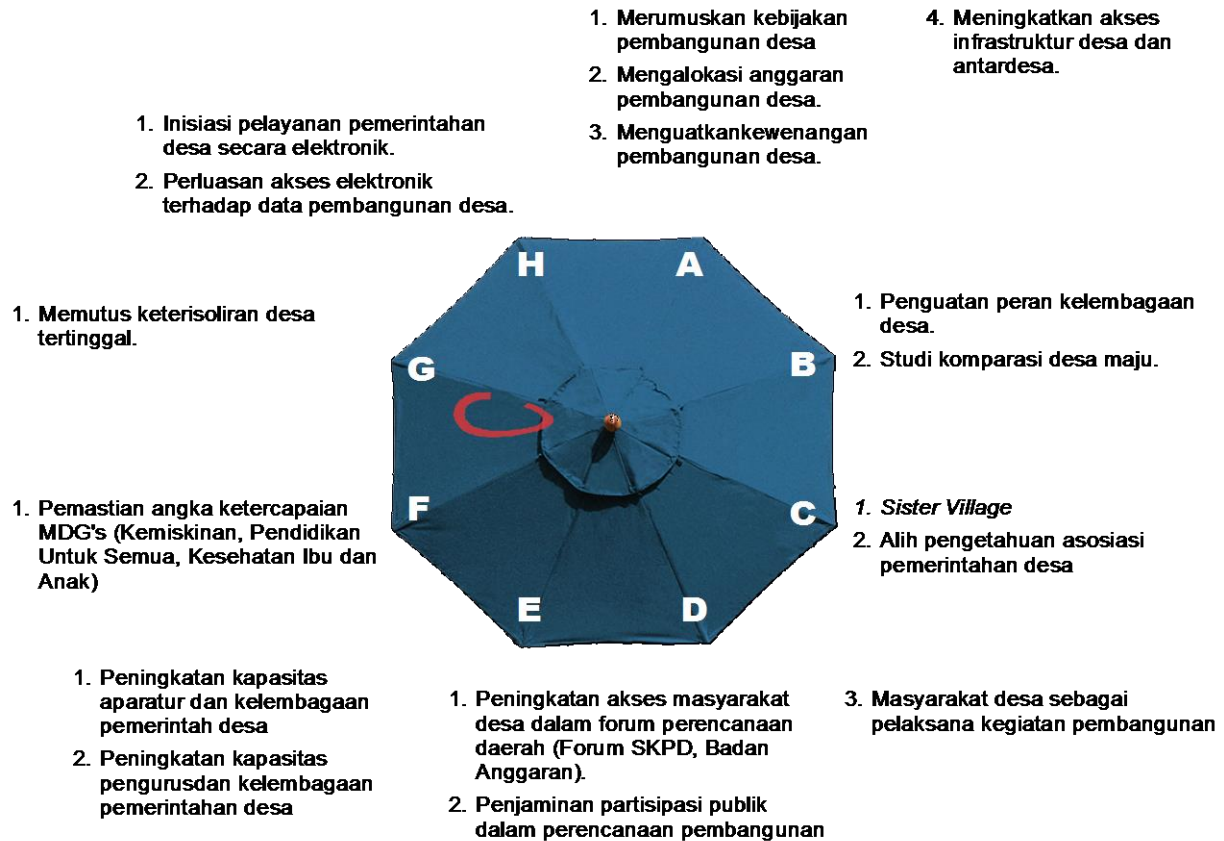
1. Cinta Desa

Cinta Desa merupakan kebijakan pembangunan yang bertitiktolak dari pendekatan spasial di desa. Cinta Desa tidak hanya ingin menjadikan desa sebagai lokus pembangunan, tetapi juga menjadikan desa sebagai pelaku pembangunan yang merumuskan sendiri perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Untuk mewujudkan desa sebagai wilayah sekaligus pelaku pembangunan dilakukan serangkaian perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Merumuskan kebijakan pembangunan desa
 - 2) Mengalokasikan anggaran pembangunan desa
 - 3) Penguatan kewenangan pembangunan desa
 - 4) Peningkatan akses infratraktur desa dan antardesa
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan peran kelembagaan desa
 - 2) Studi komparasi desa maju

- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) *Sister village*
 - 2) Alih pengetahuan asosiasi pemerintah desa
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Peningkatan akses masyarakat desa dalam forum perencanaan daerah (Forum SKPD, Badan Anggaran)
 - 2) Penjaminan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan
 - 3) Masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa
 - 2) Peningkatan kapasitas pengurus dan kelembagaan pemerintahan desa
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Pemastian angka ketercapaian MDG's (kemiskinan, pendidikan untuk semua, kesehatan ibu dan anak).
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Memutus keterisoliran desa tertinggal
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Inisiasi pelayanan pemerintahan desa secara elektronik
 - 2) Perluasan akses elektronik terhadap data pembangunan desa

Kerangka pembangunan Cinta Desa juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.1. berikut ini.



Gambar 5.1. Kerangka Pembangunan Cinta Desa

2. Reformasi Birokrasi (Cinta Rakyat)

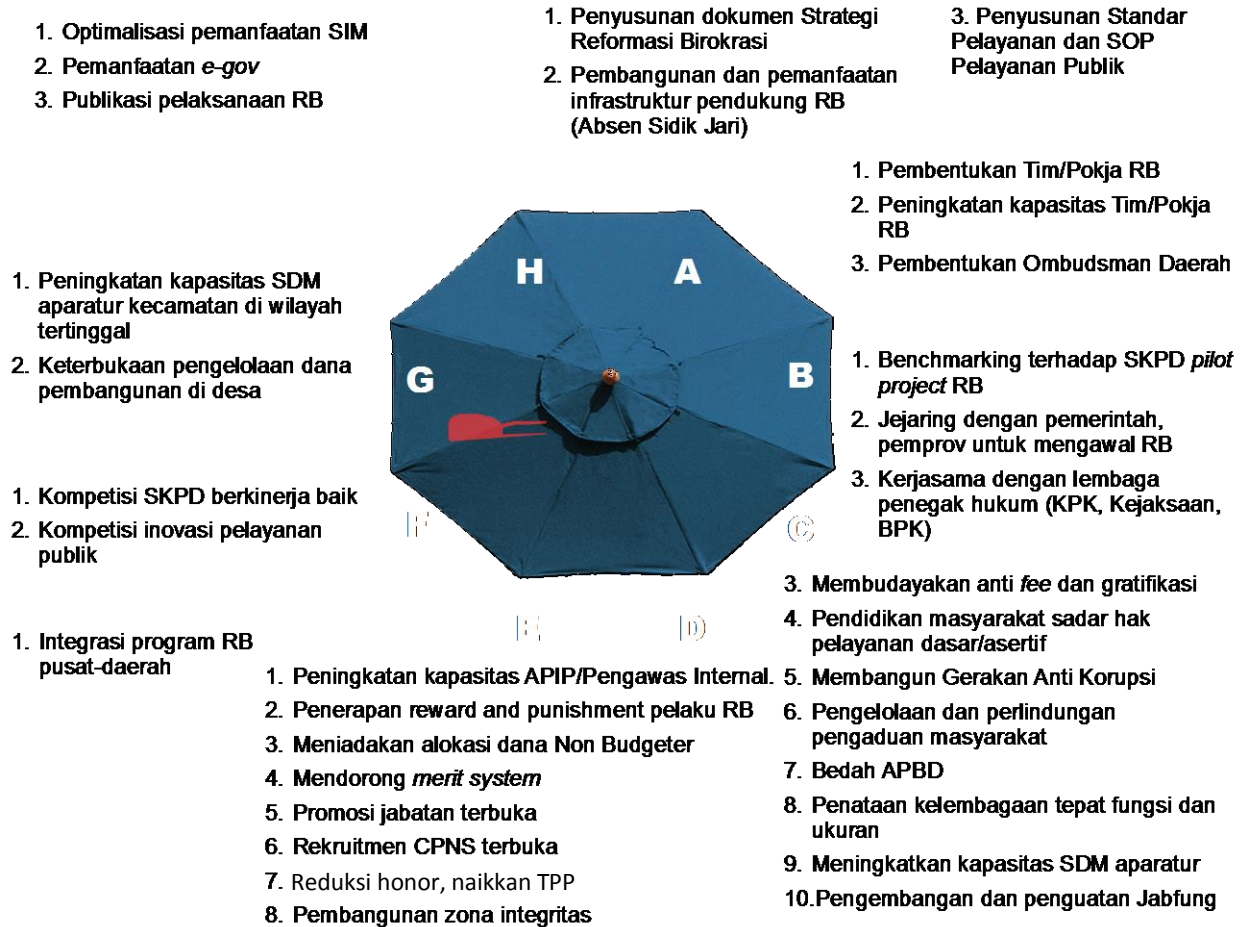
Kebijakan Reformasi Birokrasi sesungguhnya menjadi “prasyarat” agar pembangunan yang diharapkan terwujud dapat dicapai. Reformasi Birokrasi merupakan kondisi pemerintah yang baik, yang diharapkan akan bekerja dengan baik pula. Pengalaman tidak optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seringkali bukan disebabkan oleh perencanaan pembangunan yang kurang baik melainkan disebabkan oleh ketidaksiapan atau kekurangsempurnaan sistem, tata kerja dan perilaku birokrasi. Kebijakan Reformasi Birokrasi hendak mengurai problem internal birokrasi, agar birokrasi dapat bekerja dengan baik dalam pembangunan. Agenda-agenda kebijakan Reformasi Birokrasi sesuai Sistem Inovasi Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan dokumen strategi Reformasi Birokrasi
 - 2) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung Reformasi Birokrasi (misalnya: absensi sidik jari)
 - 3) Penyusunan standar pelayanan dan SOP pelayanan publik

- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Pembentukan Tim/Pokja Reformasi Birokrasi
 - 2) Peningkatan kapasitas Tim/Pokja Reformasi Birokrasi
 - 3) Pembentukan Ombudsman Daerah
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) *Benchmarking* terhadap SKPD *pilot project* Reformasi Birokrasi
 - 2) Jejaring dengan pemerintah, pemerintah provinsi dalam mengawal Reformasi Birokrasi
 - 3) Kerjasama dengan lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, BPK)
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Peningkatan kapasitas APIP/Pengawas Internal
 - 2) Penetapan *reward and punishment* pelaku Refromasi Birokrasi
 - 3) Meniadakan alokasi dana *non budgeter*
 - 4) Mendorong *merit system*
 - 5) Promosi jabatan terbuka
 - 6) Pengadaan CPNS terbuka
 - 7) Reduksi honor kegiatan dan menaikkan TPP
 - 8) Pembangunan zona integritas
 - 9) Membudayakan anti *fee* dan gratifikasi
 - 10) Pendidikan masyarakat sadar hak pelayanan/asertif
 - 11) Membangun Gerakan Anti Korupsi
 - 12) Pengelolaan dan perlindungan pengaduan masyarakat
 - 13) Bedah APBD
 - 14) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran
 - 15) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur
 - 16) Pengembangan dan penguatan Jabatan Fungsional
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Integrasi program Reformasi Birokrasi pusat dan daerah
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Kompetisi SKPD berkinerja baik
 - 2) Kompetisi inovasi pelayanan publik
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM di wilayah kecamatan tertinggal
 - 2) Keterbukaan pengelolaan dana pembangunan di desa
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Optimalisasi pemanfaatan SIM

- 2) Pemanfaatan *e-gov*
- 3) Publikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.2. di bawah ini.



Gambar 5.2. Kerangka Pembangunan Reformasi Birokrasi

3. Permukiman Kreatif (Cinta Rakyat)

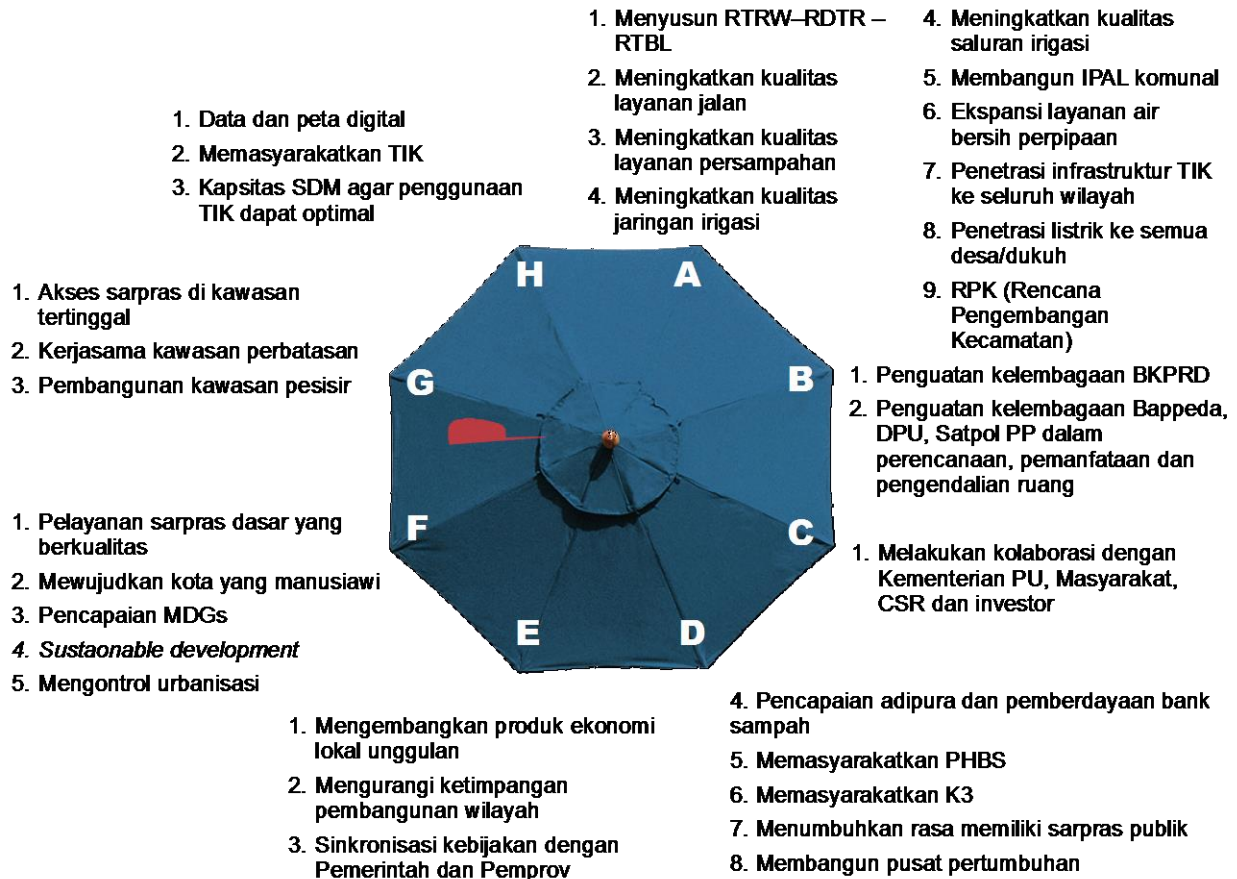
Permukiman Kreatif merupakan kebijakan yang diinisiasi pemerintah untuk menjamin masyarakat tinggal, hidup dan tumbuh dalam kawasan yang berkualitas. Permukiman yang berkualitas merupakan permukiman yang memiliki infrastruktur yang cukup dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Agenda kebijakan Permukiman Kreatif secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Menyusun RTRW-RDTR-RTBL
 - 2) Meningkatkan kualitas layanan jalan
 - 3) Meningkatkan kualitas layanan persampahan

- 4) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
 - 5) Meningkatkan kualitas saluran irigasi
 - 6) Membangun IPAL komunal
 - 7) Ekspansi layanan air bersih perpipaan
 - 8) Penetrasi infrastruktur TIK ke seluruh wilayah
 - 9) Penetrasi listrik ke semua desa/dukuh
 - 10) Rencana Pengembangan Kecamatan (RPK)
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan kelembagaan BKPRD
 - 2) Penguatan kelembagaan Bappeda, DPU, Satpol PP dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
 - c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Melakukan kolaborasi dengan Kementerian PU, masyarakat, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan investor
 - d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Mengembangkan produk ekonomi lokal unggulan
 - 2) Mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah
 - 3) Sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi
 - 4) Pencapaian adipura dan pemberdayaan bank sampah
 - 5) Memasyarakatkan PHBS
 - 6) Memasyarakatkan K3
 - 7) Menumbuhkan rasa memiliki sarana dan prasarana publik
 - 8) Membangun pusat pertumbuhan
 - e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan kluster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Pelayanan sarpras dasar yang berkualitas
 - 2) Mewujudkan kota yang manusiawi
 - 3) Pencapaian MDGs
 - 4) Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
 - 5) Mengontrol urbanisasi
 - f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
 - g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Akses sarpras di kawasan tertinggal
 - 2) Kerjasama kawasan perbatasan
 - 3) Pembangunan kawasan pesisir

- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Data dan peta digital
 - 2) Memasyarakatkan TIK
 - 3) Kapasitas SDM agar penggunaan TIK dapat optimal

Kerangka pembangunan Permukiman Kreatif juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.3. di bawah ini.



Gambar 5.3. Kerangka Pembangunan Permukiman Kreatif

4. Industri Permesinan (Cinta Produk Tegal)

Kabupaten Tegal telah dikenal luas sebagai “Jepang-nya Indonesia.” Potensi industri logam termasuk di dalamnya industri permesinan telah tumbuh dan eksis di tengah masyarakat. Agar potensi ini dapat lebih berkembang, disusun kebijakan pengembangan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan dokumen strategi pengembangan Industri Permesinan
 - 2) Insentif pelaku usaha Industri Permesinan ramah lingkungan

- 3) Kebijakan pemanfaatan produk lokal untuk pasar lokal
- 4) Skema pembiayaan berisiko
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan kapasitas pelaku rekayasa alat
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Penguatan kerjasama dengan BPPT
 - 2) Membangun kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Peningkatan kapasitas aparatur penyusun kegiatan/kebijakan
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Bursa produk mesin
 - 2) Dorongan untuk produksi bersama (lembaga produksi bersama)
 - 3) Menumbuhkan industri jasa desain mesin
 - 4) Peningkatan peran penyuluh dalam klaster Industri Permesinan
 - 5) Penguatan inkubator bisnis
 - 6) Penumbuhan pelaku baru dalam Industri Permesinan
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Perlindungan tenaga kerja anak
 - 2) Industri ramah lingkungan
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Mendorong perekrutan tenaga kerja dari wilayah tertinggal
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Pemanfaatan ICT oleh pelaku Industri Permesinan
 - 2) Penataan pangkalan data digital Industri Permesinan

Kerangka pembangunan Industri Permesinan juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.4. berikut ini.



Gambar 5.4. Kerangka Pembangunan Industri Permesinan

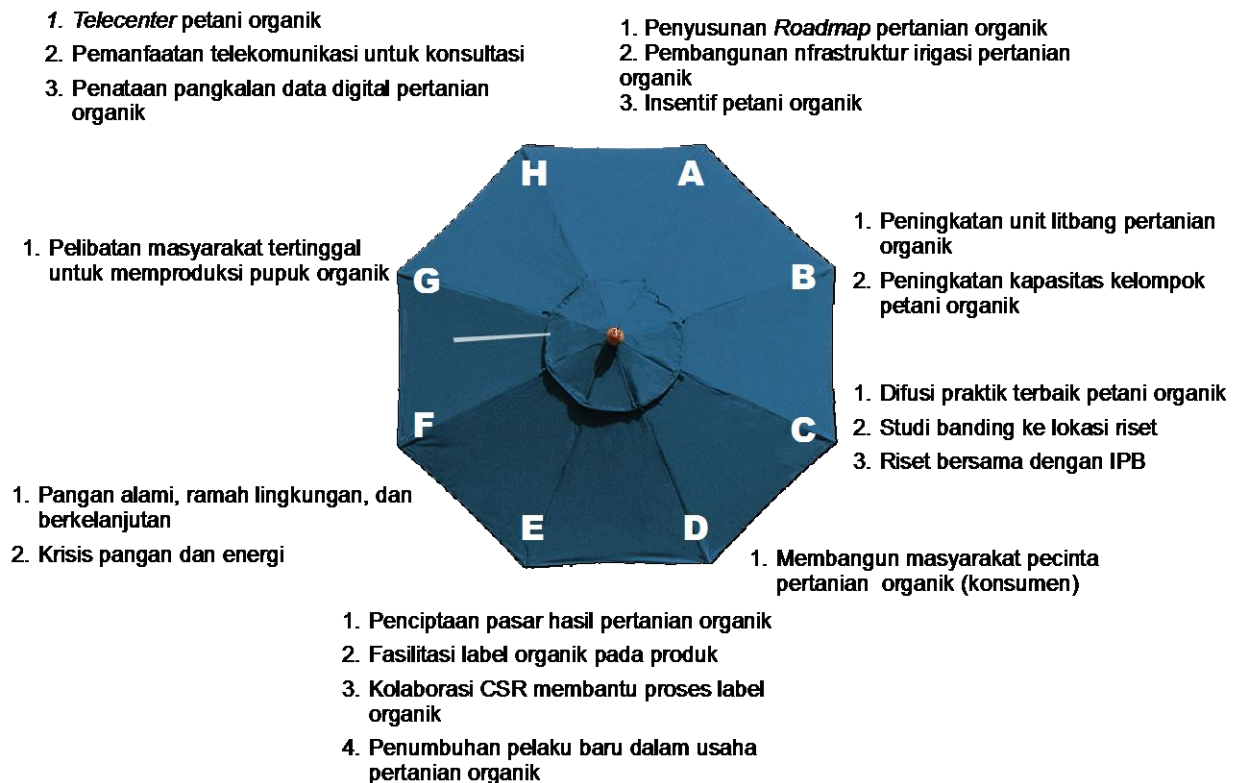
5. Industri Pertanian (Cinta Produk Tegal)

Industri Pertanian merupakan inisiasi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pertanian di Kabupaten Tegal. Agar potensi pertanian yang ada dapat berkembang dan memberi nilai tambah yang optimal bagi pelaku usaha pertanian khususnya petani, disusun kebijakan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan *roadmap* pertanian organik
 - 2) Pembangunan infrastruktur irigasi pertanian organik
 - 3) Insentif petani organik
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Peningkatan unit litbang pertanian organik
 - 2) Peningkatan kapasitas kelompok petani organik
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.

- 1) Difusi praktik terbaik petani organik
- 2) Studi banding ke lokasi riset
- 3) Riset bersama dengan IPB
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Membangun masyarakat pecinta pertanian organik (konsumen)
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Penciptaan pasar hasil produksi pertanian organik
 - 2) Fasilitasi label organik pada produk
 - 3) Kolaborasi CSR membantu proses label organik
 - 4) Penumbuhan pelaku baru dalam industri pertanian organik
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Pangan alami, ramah lingkungan, berkelanjutan
 - 2) Krisis pangan dan energi
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Pelibatan masyarakat tertinggal untuk memproduksi pupuk organik
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) *Telecenter* petani organik
 - 2) Pemanfaatan telekomunikasi untuk konsultasi
 - 3) Penataan pangkalan data digital pertanian organik

Kerangka pembangunan Industri Pertanian juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.5. berikut ini.



Gambar 5.5. Kerangka Pembangunan Industri Pertanian

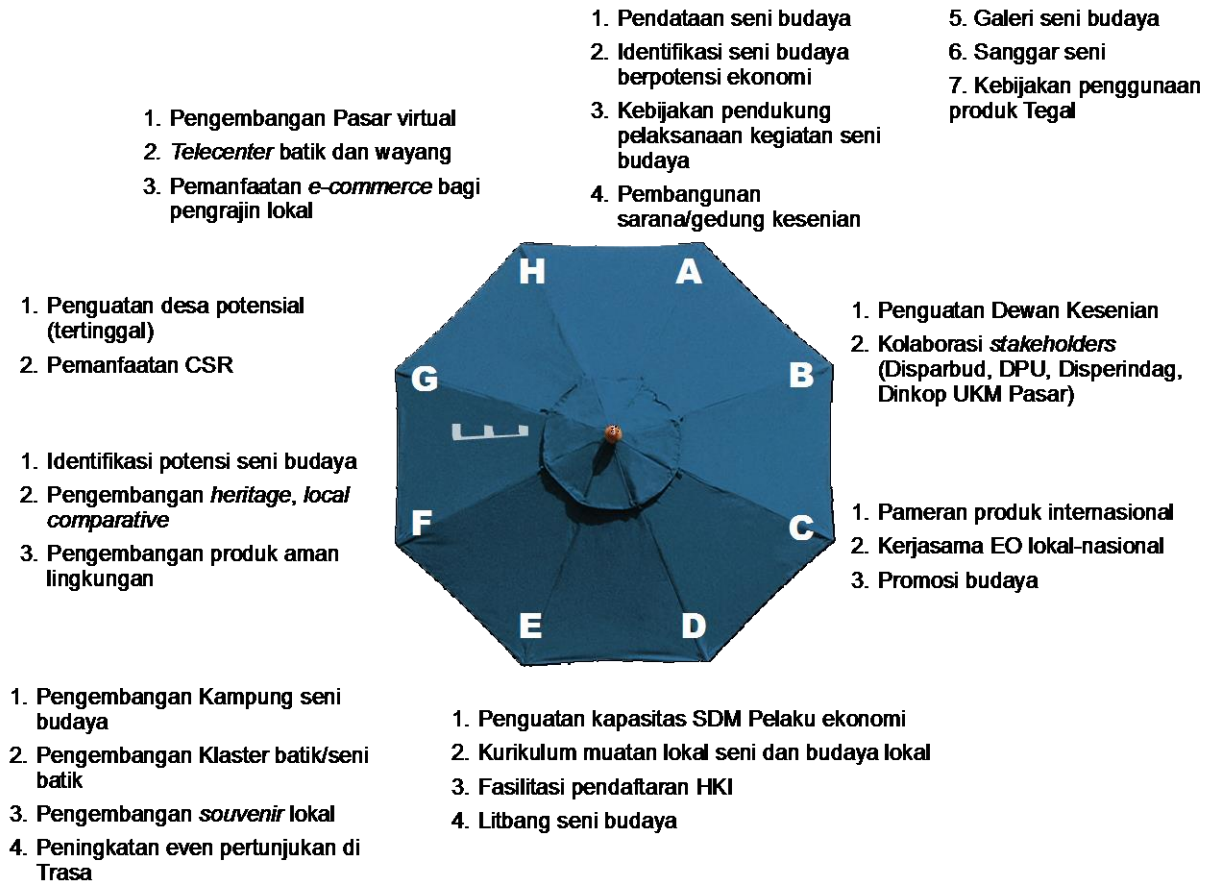
6. Ekonomi Berbasis Seni Budaya (Cinta Budaya)

Pembangunan seni dan budaya dilakukan selain untuk mengembangkan marwah seni dan budaya juga sekaligus sebagai potensi ekonomi lokal. Pengembangan seni dan budaya harus memiliki dampak positif bagi usaha peningkatan pendapatan pelaku seni. Agar pembangunan seni dan budaya yang berbasis ekonomi dapat optimal disusun manual agenda kebijakan yang perlu dilakukan secara serentak dan tersistem sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Pendataan seni dan budaya
 - 2) Identifikasi seni dan budaya berpotensi ekonomi
 - 3) Penyusunan kebijakan pendukung pelaksanaan kegiatan seni dan budaya
 - 4) Pembangunan sarana/gedung kesenian
 - 5) Pembangunan dan pembinaan galeri seni dan budaya
 - 6) Pembinaan sanggar seni
 - 7) Kebijakan penggunaan produk Tegal

- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan lembaga Dewan Kesenian
 - 2) Kolaborasi *stakeholders* (Disparbud, DPU, Disperindag, Dinkop UKM Pasar,
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Pameran produk internasional
 - 2) Kerjasama *Event Organizer* (EO) lokal dan nasional
 - 3) Promosi budaya
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Penguatan kapasitas SDM pelaku ekonomi
 - 2) Kurikulum muatan lokal tentang seni dan budaya lokal
 - 3) Fasilitasi pendaftaran HKI
 - 4) Litbang seni dan budaya
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Pengembangan kampung seni dan budaya
 - 2) Pengembangan klaster seni batik
 - 3) Pengembangan *souvenir* lokal
 - 4) Peningkatan pentas pertunjukan di Trasa.
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Identifikasi potensi seni dan budaya
 - 2) Pengembangan *heritage* dan *local comparative*
 - 3) Pengembangan produk aman lingkungan
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Penguatan desa potensial seni dan budaya namun tertinggal
 - 2) Pemanfaatan CSR
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Pengembangan pasar virtual
 - 2) Telecenter batik dan wayang
 - 3) Pemanfaatan *e-commerce* bagi pengrajin lokal

Kerangka pembangunan Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.6 berikut ini.



Gambar 5.6. Kerangka Pembangunan Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya

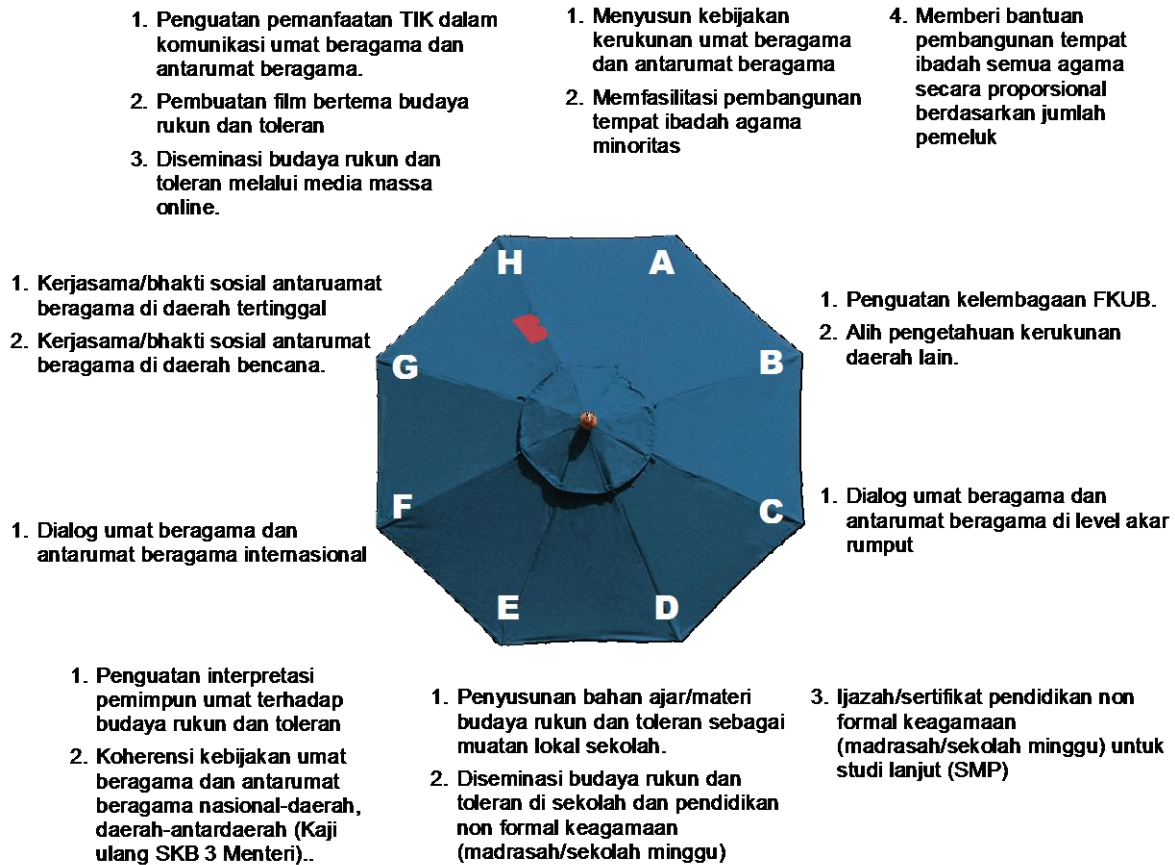
7. Budaya Rukun dan Toleran (Cinta Budaya)

Budaya rukun dan toleran adalah kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal. Iklim yang kondusif merupakan salah satu indikator kualitas kenyamanan lingkungan. Budaya *pareduluran*, yakni budaya rukun dan toleran yang menjadi karakteristik masyarakat Tegal hendak terus dijaga melalui kebijakan pembangunan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Menyusun kebijakan kerukunan umat beragama dan antarumat beragama
 - 2) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah agama minoritas
 - 3) Memberikan bantuan pembangunan tempat ibadah semua agama secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk
- Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan kelembagaan FKUB

- 2) Alih pengetahuan kerukunan daerah lain
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Dialog umat beragama dan antarumat beragama di level akar rumput
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Penyusunan bahan ajar/materi budaya rukun dan toleran sebagai muatan lokal sekolah
 - 2) Diseminasi budaya rukun dan toleran di sekolah dan pendidikan non formal keagamaan (madrasah, sekolah minggu)
 - 3) Ijazah/sertifikat pendidikan non formal keagamaan (madrasah, sekolah minggu) untuk studi lanjut (SMP)
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Penguatan interpretasi pemimpin umat terhadap budaya rukun dan toleran
 - 2) Koherensi kebijakan umat beragama dan antarumat beragama beragama nasional-daerah, daerah-antardaerah (kaji ulang SKB 3 Menteri)
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Dialog umat beragama dan antarumat beragama internasional
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Kerjasama/bhakti sosial antarumat beragama di daerah tertinggal
 - 2) Kerjasama/bhakti sosial antarumat beragama di daerah bencana
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Penguatan pemanfaatan TIK dalam komunikasi umat beragama dan antarumat beragama
 - 2) Pembuatan film bertema budaya rukun dan toleran
 - 3) Diseminasi budaya rukun dan toleran melalui media massa *online*

Kerangka pembangunan Budaya Rukun dan Toleran juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.7 berikut ini.



Gambar 5.7. Kerangka Pembangunan Budaya Rukun dan Toleran

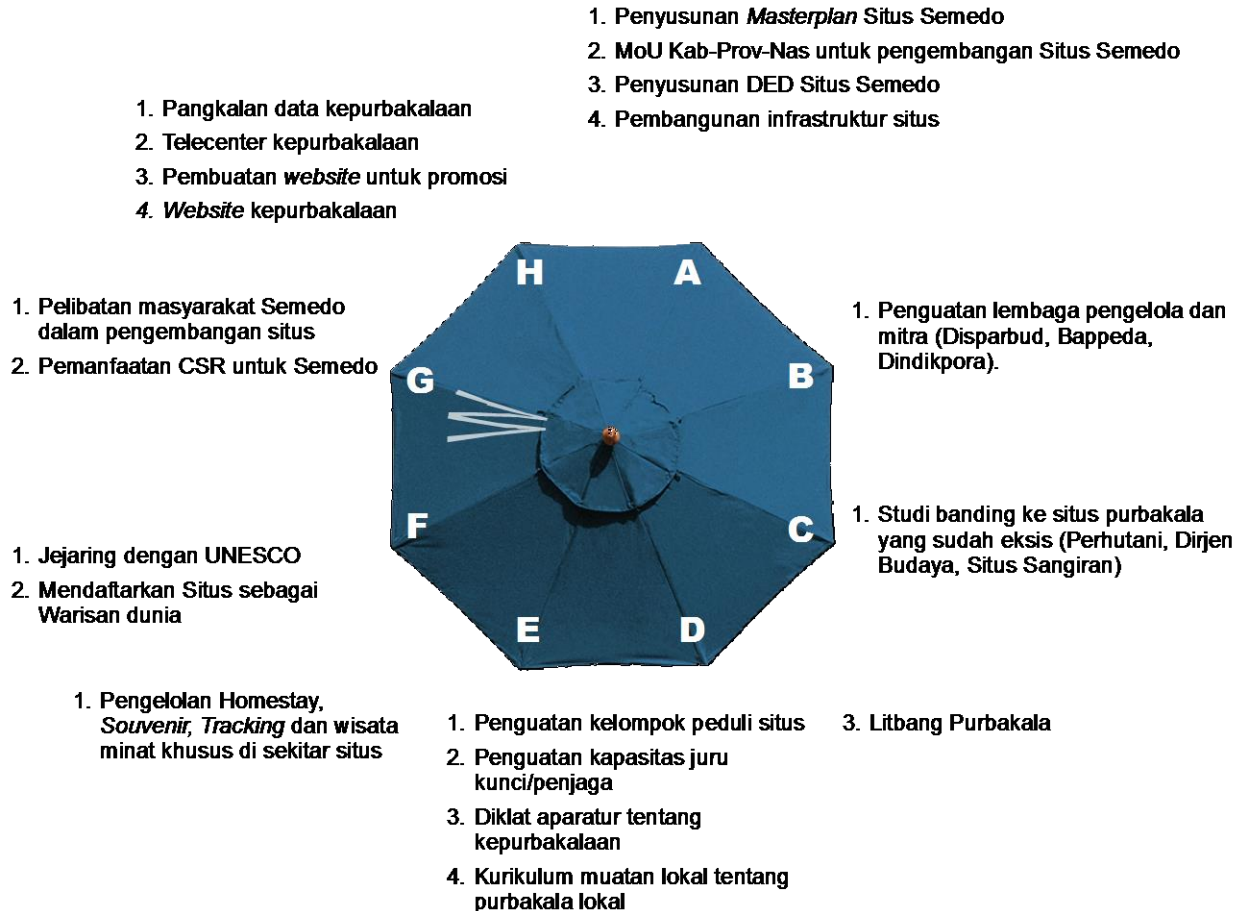
8. Wisata Purbakala (Cinta Budaya)

Wisata Purbakala merupakan kebijakan pengembangan kepurbakalaan di Kabupaten Tegal. Pengembangan kepurbakalaan terutama akan dilakukan di Situs Semedo di mana terdapat banyak fosil-fosil purba. Meski demikian, kebijakan Wisata Purbakala ini dapat direplikasi di tempat lain yang memiliki potensi kepurbakalaan yang besar. Wisata Purbakala didesain tidak hanya memenuhi aspek pariwisata, tetapi juga aspek pendidikan hingga penguatan ekonomi lokal. Berikut disajikan agenda-agenda Sistem Inovasi Daerah dalam kebijakan Wisata Purbakala:

- Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan *Masterplan* Situs Semedo
 - 2) MoU Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan Situs Semedo
 - 3) Penyusunan DED Situs Semedo
 - 4) Pembangunan infrastruktur situs
- Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.

- 1) Penguatan lembaga pengelola dan mitra (Disparbud, Bappeda, Dindikpora)
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Studi banding ke situs purbakala yang sudah eksis (Perhutani, Dirjen Budaya, Situs Sangiran)
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Penguatan kelompok peduli situs
 - 2) Penguatan kapasitas juru kunci/penjaga
 - 3) Diklat aparatur tentang kepurbakalaan
 - 4) Kurikulum muatan lokal tentang purbakala lokal
 - 5) Litbang purbakala
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Pengelolaan *homestay*, *souvenir*, *trackking* dan wisata minat khusus di sekitar situs.
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Jejaring dengan UNESCO
 - 2) Mendaftar situs sebagai warisan dunia
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Pelibatan masyarakat Semedo dalam pengembangan situs
 - 2) Pemanfaatan CSR untuk Situs Semedo
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Pangkalan data kepurbakalaan
 - 2) *Telecenter* kepurbakalaan
 - 3) Pembuatan *website* untuk promosi
 - 4) *Website* kepurbakalaan

Kerangka pembangunan Wisata Purbakala juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.8 berikut ini.



Gambar 5.8. Kerangka Pembangunan Wisata Purbakala

9. Pengobatan Alami (Cinta Budaya)

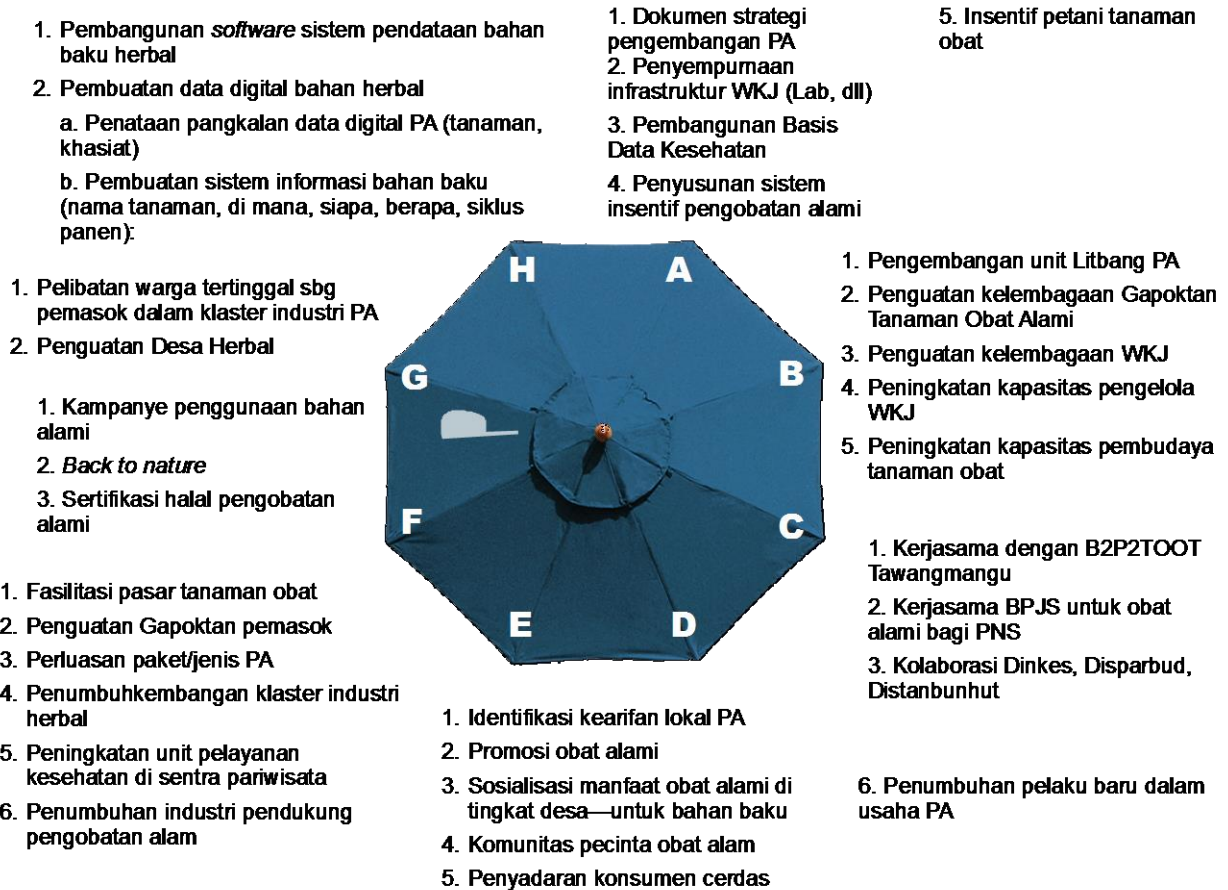
Pengobatan alami merupakan inovasi—lebih tepatnya menggali kembali khazanah—kesehatan yang telah diinisiasi di Kabupaten Tegal. Pengobatan Alami dapat berbentuk herbal atau jamu atau tindakan media lain menggunakan bahan-bahan alami. Pengobatan Alami dilakukan secara terstandar untuk menjamin kualitasnya dan sebagai satu sistem dilakukan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan dokumen strategi pengembangan Pengobatan Alami
 - 2) Penyempurnaan infrastruktur Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)
 - 3) Pembangunan basis data kesehatan
 - 4) Penyusunan sistem insentif Pengobatan Alami
 - 5) Memberikan insentif bagi petani tanaman obat

- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Pengembangan unit litbang Pengobatan Alami
 - 2) Penguatan kelembagaan Gapoktan tanaman obat alami
 - 3) Penguatan kelembagaan WKJ
 - 4) Peningkatan kapasitas pengelola WKJ
 - 5) Peningkatan kapasitas pembudaya tanaman obat
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Kerjasama dengan B2P2TOOT Tawangmangu
 - 2) Kerjasama BPJS untuk pengobatan alami PNS
 - 3) Kolaborasi Dinkes, Ditambunhut, Disparbud
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Identifikasi kearifan lokal Pengobatan Alami
 - 2) Promosi pengobatan alami
 - 3) Sosialisasi manfaat bahan alami di desa (untuk bahan baku)
 - 4) Fasilitasi komunitas pecinta obat alami
 - 5) Penyadaran konsumen cerdas
 - 6) Penumbuhan pelaku baru dalam usaha Pengobatan Alami
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan kluster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Fasilitasi pasar tanaman obat
 - 2) Penguatan Gapoktan pemasok bahan baku
 - 3) Perluasan paket/jenis Pengobatan Alami
 - 4) Penumbuhkembangan kluster industri herbal
 - 5) Peningkatan unit pelayanan kesehatan di sentra pariwisata
 - 6) Penumbuhan industri pendukung Pengobatan Alam
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Kampanye penggunaan bahan alami
 - 2) Kampanye *back to nature*
 - 3) Sertifikasi halal pengobatan alami
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Pelibatan warga di daerah tertinggal sebagai pemasok bahan baku Pengobatan Alami
 - 2) Penguatan desa herbal
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Pembangunan *software* sistem pendataan bahan baku herbal
 - 2) Pembuatan data digital bahan herbal

- a) Penataan pangkalan data digital Pengobatan Alami (identifikasi tanaman berkhasiat)
- b) Pembuatan sistem informasi bahan baku (nama tanaman, di mana, siapa yang memiliki, berapa banyak, siklus panen)

Kerangka pembangunan Pengobatan Alami juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.9 di bawah ini.



Gambar 5.9. Kerangka Pembangunan Pengobatan Alami

Agenda-agenda kerangka pembangunan ini disebar dan tersebar dalam hierarki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD. Payung-kerangka pembangunan perlu disusun dan diberi kedudukan secara eksplisit dalam RPJMD untuk memberi tema pembangunan yang tersistem dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

Tujuan

Misi I (Kesatu) : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi.

Tujuan Misi I (Kesatu) adalah:

- a. Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal.
- b. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran:

Tujuan: a. Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat
- 3) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*
- 4) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tujuan: b. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan
- 2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
- 3) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan.
- 4) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).

Tujuan

Misi II (kedua) : Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.

Tujuan Misi II (kedua) adalah :

- a. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian
- b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan
- c. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan
- d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
- e. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan

Sasaran:

Tujuan: a. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)
- 2) Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan
- 3) Meningkatnya infrastruktur pertanian
- 4) Revitalisasi kelembagaan pertanian
- 5) Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 6) Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya
- 7) Meningkatnya keterlibatan jejaring *paseduluran* dan CSR petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal
- 8) Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya.
- 9) Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani
- 10) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya

Tujuan: b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan
- 2) Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional
- 3) Meningkatnya daya saing perdagangan

- 4) Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa

Tujuan: c Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif
- 2) Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan
- 3) Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah
- 4) Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata
- 5) Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan
- 6) Meningkatnya pemanfaatan *telecenter* ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan)
- 7) Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandardisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah

Tujuan: d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)
- 2) Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)
- 3) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
- 4) Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal

Tujuan: e. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Terarahnya pengembangan wilayah
- 2) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang
- 3) Mewujudkan ruang yang manusiawi
- 4) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan
- 5) Mewujudkan rintisan kota kembar (*sister city*)

Tujuan

Misi III (ketiga) : Mewujudkan kehidupan *pareduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Tujuan Misi III (ketiga) adalah:

- a. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama
- b. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama

Sasaran:

Tujuan: a. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif.
- 2) Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tujuan : b. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Menguatnya pembangunan kehidupan beragama

Tujuan

Misi IV (Keempat) : Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional

Tujuan Misi IV(Kempat) adalah:

- a. Melindungi dan memanfaatkan seni budaya
- b. Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran:

Tujuan: a. Melindungi dan memanfaatkan seni budaya

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal.
- 2) Terpromosikannya seni budaya lokal
- 3) Meningkatkan peran seni budaya dalam pembangunan
- 4) Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya
- 5) Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi

Tujuan: b. Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat
- 2) Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat
- 3) Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional

Tujuan

Misi V (Kelima) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan Misi V (kelima) adalah:

- a. Meningkatkan fungsi kelembagaan desa
- b. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa

Sasaran:

Tujuan: a. Meningkatkan fungsi kelembagaan desa.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Berdayanya kelembagaan desa

Tujuan : b. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah.
- 2) Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa